



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHAIRUDDIN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 875261

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.601.060.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 631 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah Seluas 328 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 195.060.000
4. Tanah Seluas 482 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 241.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 193.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 833.335.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 558.028.124

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.185.423.124

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.185.423.124

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.